

ABSTRAK

Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Papua Tahun 2011-2015 Telaah Ekonomi Islam

MOH AGUS NUGROHO
NIM.15913024

Pasca keputusan Presiden RI ke-7, Joko Widodo yang menetapkan 122 kabupaten tertinggal 2015-2019. Membuat Provinsi Papua menempatkan posisinya menjadi daerah paling tertinggal dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Mengingat darat Provinsi Papua merupakan pertambangan emas terbesar di dunia. Hal yang menjadi sorotan menarik bagi peneliti untuk mengupas berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi di Papua dan menelaahnya kedalam konsep ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesenjangan ekonomi yang ada di Papua selama periode 2011-2015 dan untuk mengkaji, serta menganalisis pandangan ekonomi Islam tentang kesenjangan ekonomi di Papua dengan konsep ekonomi yang berkeadilan mengacu pada ajaran Islam. Menggunakan indeks Williamson dalam mengukur kesenjangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Papua dengan analisis PDRB perkapita dan jumlah penduduk. Kemudian ditelaah dengan konsep pemikiran ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif dengan analisis melalui 4 (tahapan) yaitu pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini permasalahan mendasar pada Papua yaitu pertumbuhan IPM Papua 2014-2015 hanya tumbuh sebesar 0,88 persen sehingga secara nasional menempati urutan ke-21 dari 34 provinsi, infrastruktur seperti kepadatan jalan juga menempati posisi dibawah dari 33 provinsi dan struktur ekonomi yang bergantung pada pertambangan juga menjadi masalah. Ketimpangan tertinggi terjadi di Kabupaten Mimika dengan rata-rata angka Indeks Williamson sebesar 2,007 dan Kabupaten Keerom terendah dengan Indeks Williamson sebesar 0,006. Secara konsep ekonomi Islam, ketimpangan antar wilayah karena tidak meratanya distribusi kekayaan. Namun, keadilan distribusi seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf kurang efektif, karena hanya 13,15 persen penduduknya yang beragama muslim di Papua. Sehingga peneliti menawarkan solusi dengan menggunakan pemikiran M. Umer Chapra mengenai kesenjangan ekonomi, yaitu pembangunan manusia, mengurangi pemusatan kekayaan, restruktur ekonomi, restrukturisasi keuangan dan perencanaan kebijakan strategi.

Kata kunci: *Kesenjangan, Provinsi, Ekonomi, Islam*

ABSTRACT

Economic Inequality in Papua Province during 2011-2015 A Study of Islamic Economics

MOH. AGUS NUGROHO
Student ID: 15913024

The Decree of the 7th President of Indonesia, Joko Widodo, to name 122 underdeveloped regencies in 2015-2019, has listed Papua Province as the most underdeveloped among 34 provinces in Indonesia. Various economic problems appear in Papua Province although this region has the largest gold mine in the world. The researcher was interested in discussing the economic problems in Papua and studying them based on the concept of Islamic economics. This study aimed to describe the economic inequality in Papua during the period 2011-2015 and to analyze the perspective of Islamic economics on this problem by referring to the concept of fair economy in Islam. Using the Williamson Index of Inequality, the economic disparity among regencies in Papua Province was measured together with an analysis of GRDP per capita and population followed by a study using the concept of Islamic economics. This study used the descriptive qualitative method with four analysis stages including data gathering, data reduction, data verification, and conclusion withdrawal. The results showed that the HDI of Papua in 2014-2015 only reached 0.88 percent, making it rank 21 among the 34 provinces. Infrastructure, such as road density, also ranked below the other 33 provinces, and the economic structure that relies on mining also became a problem. The highest inequality occurred in Mimika Regency with Williamson Index as much as 2.007, and Keerom Regency had the lowest one, reaching 0.006. According to the concept of Islamic economics, inter-region disparity is often caused by inequitable distribution of wealth. The equity of the distribution of zakat, infaq, sadaqah, and waqf was ineffective because only 13.15% population in Papua is Muslim. The researcher recommended the thought of M. Umer Chapra on economic inequality, which includes human development, reducing centralization of wealth, economic restructuring, financial restructuring, and strategic policy planning.

Keywords: *Inequality, Province, Economics, Islam*